

**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang  
Periode Tahun 2017-2021**

**Jougogo Abdullah, Indah Zakiyah**  
**Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Kupang, Kupang, Indonesia**  
**Email: [indahzakiyah82@gmail.com](mailto:indahzakiyah82@gmail.com)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah kota Kupang pada Tahun anggaran 2017-2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode tahun 2017-2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka dan studi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menghitung rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efesiensi, rasio pertumbuhan dan belanja dari laporan keuangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah kota kupang dengan membuat tabel mengukur peringkat kinerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan pemerintah kota Kupang kurang baik dalam mengelola Anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi di kategorikan kurang dikarenakan rata-rata desentralisasinya sebesar 17 persen, rasio ketergantungan keuangan daerah dikategorikan sangat tinggi dikarenakan rata-rata ketergantungan sebesar 76 persen, rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan rendah sekali dikarenakan rata-rata kemandiriannya sebesar 23 persen, rasio efektivitas dikategorikan sangat efektif dikarenakan rata-rata efektivitasnya diatas 90 persen yaitu sebesar 97 persen, rasio efesiensi dikategorikan kurang efisien dikarenakan rata-rata efesiensinya sebesar 36 persen, dan rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja dikategorikan bergerak secara negatif dikarenakan rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanjanya sebesar -3 dan -4.

**Kata Kunci:** kinerja keuangan, laporan keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efesiensi, rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja.

**Abstract**

*This study aims to determine the financial performance of the Kupang city government in the 2017-2021. The type of research is quantitative research. The data used in this study is the financial report of the realization of the regional income and expenditure budget for the period 2017-2021. Data collection techniques used are library research and field studies. The data analysis technique used is descriptive statistics by calculating the degree of decentralization ratio, dependency ratio, effectiveness ratio, effeciency ratio, income and expenditure growth ratio from the financial statem ents of the realization of the local government's revenue and expenditure budget by making a table measuring performance rantings.*

*The results of the study indicate that in general the performance of the Kupang city government is not good in managing its regional revenue and expenditure budget. This can be seen from the results of calculation of the degree of decentralization ratio in the category of*

*less because the average decentralization is 17 percent, the regional financial dependence ratio is categorized as very high because the average dependency is 76 percent, the ratio of regional financial independence is categorized very low because the average independence is categorized very low because the average independence is 23 percent, the effectiveness ratio is categorized as very effective because the average effectiveness is above 90 percent which is 97 percent, the efficiency ratio is categorized as less efficient because the average efficiency is 30 percent, and the income and expenditure growth ratio is categorized as moving negatively because the average income growth -3 and -4.*

*Keywords: Financial performance, regional financial statements, degree of decentralization ratio, dependency ratio, independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, income and expenditure growth ratio.*

### **Pendahuluan**

Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan laporan keuangan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Kupang dari Tahun 2017-2021 di atas menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kota Kupang kurang maksimal. Hal tersebut di pengaruhi oleh jumlah realisasi pendapatan daerah kota Kupang pada tahun 2020 tidak mampu untuk membiayai belanja daerahnya (defisit).

Kemendagri No. 21 Tahun 2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2014 pasal 157 sumber pendapatan

maupun juga penerimaan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah dan PAD lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik PEMDA;
2. Dana bagi hasil meliputi dana bagi hasil atas pajak dan sumberdaya alam;
3. Dana alokasi umum; dan
4. Dana alokasi khusus.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena mampu berkembang atau tidaknya suatu daerah tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik pula.

Kinerja dari sebuah pemerintahan menunjukkan bagaimana pelaksanaan dari otonomi daerah tersebut berjalan, sehingga hal tersebut sangat penting untuk dilihat dan diukur. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan,

dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat dan dampak.

Sujarweni (2017) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Setiap pekerjaan yang telah selesai dilakukan perlu dilakukan penilaian/pengukuran secara periodik.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran tersebut dapat menggunakan sistem penilaian (rating) yang relevan.

Untuk mengetahui seberapa baik dan besarnya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan dimasa yang akan datang, menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan, membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode yang lain. Dalam hal ini, rasio yang digunakan penulis pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur yaitu rasio kemandirian keuangan. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi kinerja keuangan selama kurun waktu 4 tahun terakhir (tahun 2017-2021).

Sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Kota Kupang juga ikut melaksanakan otonomi daerah dengan

mengelola secara mandiri dan memanfaatkan sejumlah sumber daya yang dimilikinya. Kinerja dari sebuah pemerintahan menunjukkan bagaimana pelaksanaan dari otonomi daerah tersebut berjalan, sehingga hal tersebut sangat penting untuk dilihat dan diukur. Karena keberhasilan dari suatu pemerintahan dapat dilihat dengan berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Kinerja itu sendiri merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi pemerintah.

Pemerintah kota Kupang merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan wilayah yang cukup luas yang padat penduduknya dengan mata pencaharian yang beraneka ragam. Sebagai pilar otonomi daerah kota Kupang sangat membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam membangun daerahnya. (BPS, 2021).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Kupang Periode Tahun 2017–2021.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah kota Kupang berdasarkan laporan keuangan pada Tahun anggaran 2017-2021.

## **Kajian Teori**

### **Analisis Laporan Keuangan**

Kasmir (2011) menyatakan bahwa agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama

analisis laporan keuangan agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Pada akhirnya bagi pihak pemilik dan manajemen, dengan mengetahui posisi keuangan dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat tentang apa yang harus dilakukan kedepannya. Perencanaan kedepan dengan cara menutupi kelemahan yang ada, mempertahankan posisi yang sesuai dengan yang diinginkan dan berupaya untuk meningkatkan lagi kekuatan yang sudah diperolehnya selama ini.

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan analisis yang tepat pula. Kesalahan dalam melakukan angka atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak dicapai. Kemudian hasil perhitungan tersebut dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya. Kesemuanya ini harus dilakukan secara teliti, mendalam dan jujur.

Kasmir (2016) menyatakan bahwa ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah:

- a. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode;
- b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan;

- c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang di miliki;
- d. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan saat ini;
- e. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen kedepan apakah perlu penyerangan atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal;
- f. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Kasmir (2012) dalam praktiknya terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang bisa dipakai yaitu sebagai berikut:

a. Analisis vertikal (statis)

Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. analisis dilakukan antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan perusahaan dari periode yang lain.

b. Analisis horizontal (dinamis)

Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang lain.

Kasmir (2012) menyatakan bahwa metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan terdapat beberapa jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Analisis perbandingan antara laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan yang dimana laporan ini lebih dari satu periode. Artinya

minimal dua periode atau lebih. Dari analisis ini dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi dapat berupa kenaikan atau penurunan dari masing-masing komponen analisis. Dari perubahan ini terlihat masing-masing kemajuan atau kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya;

Kasmir (2012) menyatakan secara umum dari hasil analisis ini akan terlihat antara lain:

1. Angka-angka dalam rupiah;
  2. Angka-angka dalam perusahaan;
  3. Kenaikan atau penurunan jumlah rupiah; dan
  4. Kenaikan atau penurunan baik dalam rupiah maupun dalam presentase.
- b. Analisis trend atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam presentase dari periode ke periode yang akan datang;
- c. Analisis presentase per komponen merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui presentase investasi terhadap masing-masing komponen yang ada dalam laporan keuangan;
- d. Analisis sumber dan penggunaan dana dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan serta penggunaan dana dalam satu periode. Juga untuk mengetahui jumlah modal kerja dan sebab-sebab berubahnya modal kerja perusahaan dalam satu periode;
- e. Analisis sumber dan pengawasan kas digunakan untuk mengetahui sumber pengguna uang kas dalam suatu periode. Kemudian untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas;
- f. Analisis rasio digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau

pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laba rugi;

- g. Analisis kredit merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak dan tidaknya suatu kredit diluncurkan oleh lembaga keuangan seperti Bank. Dalam analisis ini digunakan beberapa cara alat analisis yang digunakan. Kemudian analisis juga digunakan untuk meningkatkan penjualan kredit;
- h. Analisis laba kotor digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode. Kemudian untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara periode;
- i. Analisis titik pulang pokok atau titik impas (*break even point*) digunakan untuk mengetahui pada kondisi beberapa penjualan atau produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Kegunaan analisis ini adalah untuk menentukan jumlah keuntungan pada berbagai tingkat penjualan.

### **Analisis Kinerja Keuangan**

Sujarweni (2017) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Setiap pekerjaan yang telah selesai dilakukan perlu dilakukan penilaian atau pengukuran secara periodik.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran tersebut dapat menggunakan sistem penilaian (*ranting*) yang relevan. Ranting tersebut harus mudah di gunakan sesuai dengan yang akan diukur dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja keuangan juga berarti membandingkan antara standar yang telah

ditetapkan (misalnya berdasarkan peraturan menteri keuangan) dengan kinerja keuangan yang ada dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan bersifat kuantitatif dengan berdasarkan pada laporan keuangan.

Adapun manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur presentase yang telah diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu, pengukuran ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya;
- b. Untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan kontribusi dalam perusahaan secara keseluruhan;
- c. Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang;
- d. Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan devisi atau bagian organisasi pada khususnya; dan
- e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Jumingan (2014) menyatakan bahwa analisis kinerja keuangan atau analisis keuangan daerah menyangkut review data, mengukur, menginterpretasi dan memberi solusi terhadap keuangan daerah pada suatu periode tertentu. Dengan demikian prosedur analisis meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Review data laporan. Aktivitas penyesuaian data laporan keuangan terhadap berbagai hal baik sifat atau jenis perusahaan yang melaporkan maupun sistem akuntansi yang berlaku. Sistem akuntansi yang di terapkan dalam memberikan pengakuan terhadap

pendapatan dan biaya akan menentukan jumlah pendapatan maupun laba yang di hasilkan;

- b. Menghitung. Dengan menggunakan berbagai metode teknis analisis dilakukan perhitungan-perhitungan baik metode perbandingan, presentase perkomponen, analisis rasio keuangan dan lain-lain. Dengan metode teknik apa yang digunakan dalam perhitungan sangat bergantung pada tujuan analisis;
- c. Membandingkan Atau Mengukur guna mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut apakah sangat baik, baik, sedang, kurang baik dan seterusnya;
- d. Menginterpretasi merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan antara hasil perbandingan atau pengukuran dengan kaidah teoritis yang berlaku. Hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun permasalahan apa yang dicapai perusahaan dalam pengelola keuangan; dan
- e. Solusi. Dengan memahami problem keuangan yang dihadapi perusahaan akan menemukan solusi yang tepat.

Sujarweni (2017) menyatakan bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu proses dalam membantu menganalisis atau mengevaluasi keadaan perusahaan, hasil-hasil operasi perusahaan masa lalu dan masa depan, adapun tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk menilai kinerja yang dicapai perusahaan selama ini dan mengestimasi kinerja perusahaan masa mendatang. Analisis laporan keuangan juga dapat melihat pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun ke tahun.

Hery (2014) menyatakan bahwa analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Meskipun perhitungan rasio

hanyalah merupakan operasi aritmatika sederhana, namun hasilnya memerlukan interpretasi yang tidak mudah.

Sujarweni (2017) menyatakan bahwa dengan menggunakan metode analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Tujuan melakukan analisis rasio keuangan adalah untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, menilai kinerja laporan keuangan perusahaan dalam memperdaya seluruh sumberdaya yang ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian dan definisi yang dikemukakan para ahli maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang di maksud dengan analisis kinerja keuangan adalah proses menghitung, mengdeskripsikan, dan memberi solusi terhadap hasil kerja yang dicapai suatu instansi pada periode tertentu.

### **Keuangan Daerah**

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Mamesah, Halim (2004) menyatakan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai "semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku".

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, "keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut". Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Suatu daerah yang otonomi harus mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurang ketergantungan keuangan terhadap pusat. Dengan demikian tujuan otonomi daerah bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas Otonomi.

Mahmudi (2010) terdapat enam rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran yaitu:

#### **1. Rasio Derajat Desentralisasi**

Mahmudi (2010) menyatakan bahwa derajat desentralisasi dilihat dari perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah (TPD).

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Bisma (2010) menyatakan bahwa tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa derajat desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan.

## 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Mahmudi (2010) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemda diharapkan bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah Provinsi.

## 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharap transfer dana dari pemerintah pusat.

Mahmudi (2010) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Bisma (2010) menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Secara konseptual pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2004) memperkenalkan empat macam pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- a) Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah);
- b) Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah;
- c) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang,



mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi; dan

- d) Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

#### 4. Rasio Efektivitas

Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya bisa diukur dengan efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut. Hal tersebut bisa diketahui dengan mengukur rasio efektivitas. Bisma (2010) menuliskan tentang tujuan pengukuran efektivitas: “Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan” Pengertian efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2004).

Mahmudi (2015) menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang di anggarkan sebelumnya.

Nurhayati (2015) menyatakan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah yang di anggarkan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran

pendapatan daerah sesuai dengan apa yang telah di rencanakan atau yang dianggarkan.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

#### 5. Rasio Efisiensi

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu kegiatan pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat dari rasio efisiensi. Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

#### 6. Rasio Pertumbuhan

Kasmir (2013) menyatakan bahwa rasio pertumbuhan (*growth ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Wonda (2016) menyatakan bahwa rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli

daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik.

Rasio pertumbuhan (*Growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Rasio Pertumbuhan adalah sebuah alat untuk mengukur atau mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik jika setiap tahunnya mengalami peningkatan.

### Metode

#### Metode Pengambilan Data

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data berupa data skunder yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, teknik pengumpulan data skunder tersebut melalui studi kepustakaan berupa pengumpulan informasi-informasi antara lain data kantor, buku-buku literatur, internet dan dokumentasi.

#### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis berupa rasio keuangan sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

##### a. Rasio Derajat Desantralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2010).

Derajat desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian Tingkat**  
**Desentralisasi Fiskal**

Presentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010)

##### b. Rasio Ketergantungan

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Tranfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Mahmudi (2010) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemda diharapkan bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat

ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah Provinsi.

Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Penilaian**  
**Ketergantungan Daerah**

Prosentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010)

c. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Transfer pusat+Propinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2010).

Bisma (2010) menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Secara konsepsional pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam

membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Pola Hubungan dan Tingkat**  
**Kemampuan Daerah**

Kemampuan keuangan	A1	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010).

a. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Depdagri, Kemendagri No 690.900.327.

Mahmudi (2015) menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

**Skala Penilaian Efektivitas**

Penilaian Efektivitas	Presentase Efektivitas
Sangat efektif	81% - 100%
Efektif	61%- 80%

Cukup efektif	41%- 60%
Tidak efektif	21%- 40%
Sangat Tidak efektif	Kurang dari 20 %

Sumber: Depdagri, Permendagri 2011

e. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAS}} \times 100\%$$

Sumber: Depdagri, Pemendagri 2011

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

**Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
< 10 %	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40 %	Tidak Efisien

Sumber: Depdagri, Permendagri 2011

f. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio pertumbuhan pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio pertumbuhan belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja } X_{n-1}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016).

Wonda (2016) menyatakan bahwa rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik.

**Penilaian kriteria pertumbuhan**

Kriteria pertumbuhan	Ukuran pertumbuhan
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber : Mahmudi (2016)

**Hasil dan Pembahasan**

Berikut adalah perhitungan rasio kinerja keuangam pemerintah Kota Kupang:

**a. Rasio Derajat Desentralisasi**

Kinerja keuangan pemerintah kota Kupang di katakan baik apabila derajat desentralisasinya diatas 50%. Hal ini menunjukan bahwa semakin besar derajat desentralisasinya maka pemerintah daerah mampu untuk menyelenggarakan desentralisasi.

Berdasarkan perhitungan laporan realisasi keuangan APBD diatas menunjukan bahwa pendapatan asli daerah kota Kupang dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami penurunan dengan kategori kurang, dapat lihat dari prosentase kenaikan dan penurunan PAD dengan rata-rata prosentase (14,04%) dengan kategori kurang.

Sedangkan untuk realisasi total pendapatan daerah kota Kupang dari tahun 2017

sampai tahun 2021 juga mengalami penurunan, dapat dilihat dari prosentase penurunan total pendapatan dengan rata-rata prosentase (2,21%) dengan kategori kurang.

#### **b. Rasio ketergantungan Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah kota Kupang dikatakan baik dan mandiri apabila rasio ketergantungan keuangan daerah dibawah 20%. Semakin besar tingkat ketergantungan keuangan daerah maka semakin besar pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana eksternal.

Berdasarkan perhitungan laporan realisasi keuangan APBD diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kota Kupang dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami penurunan, dapat dilihat dari prosentase kenaikan dan penurunan pendapatan transfer dengan rata-rata prosentase (4,60%) dengan kategori rendah.

Sedangkan untuk realisasi total pendapatan daerah kota Kupang dari tahun 2017 sampai tahun 2021 juga mengalami penurunan, dapat dilihat dari prosentase kenaikan dan penurunan total pendapatan dengan rata-rata prosentase (2,20%) dengan kategori rendah.

#### **c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah kota Kupang dikatakan baik dan mandiri apabila rasio kemandirian keuangan daerah diatas 50%. Semakin besar tingkat kemandirian keuangan daerah maka semakin besar pula kemandirian pemerintah daerah terhadap dana eksternal.

Berdasarkan perhitungan laporan realisasi keuangan APBD diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kota Kupang dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami penurunan, dapat dilihat dari prosentase kenaikan dan penurunan PAD dengan rata-rata prosentase (14,04%) dengan kategori konsultatif (rendah).

Sedangkan untuk pendapatan transfer diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kota Kupang dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan, dapat dilihat dari prosentase kenaikan dan penurunan pendapatan transfer dengan rata-rata prosentase 4,60% dengan kategori konsultatif (rendah).

#### **d. Rasio Efektifitas**

Berdasarkan perhitungan laporan realisasi keuangan APBD diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kota Kupang dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami penurunan, dapat dilihat dari prosentase kenaikan dan penurunan realisasi penerimaan daerah dengan rata-rata prosentase (2,20%). Dengan kategori sangat tidak efektif.

Sedangkan untuk total realisasi penerimaan daerah diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kota Kupang dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan, dapat dilihat dari prosentase kenaikan dan penurunan realisasi penerimaan dengan rata-rata prosentase 3,86% dengan kategori sangat tidak efektif.

#### **e. Rasio Efisiensi**

Berdasarkan tabel laporan realisasi keuangan APBD diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kota Kupang dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan dapat dilihat dari prosentase kenaikan dan penurunan

realisasi pendapatan dengan rata-rata prosentase 20,29% dengan kategori efisien.

Sedangkan untuk target penerimaan diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kota Kupang dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami penurunan dapat dilihat dari prosentase kenaikan dan penurunan target penerimaan dengan rata-rata prosentase (2,20%) dengan kategori efisien.

#### **f. Rasio Pertumbuhan Pendapatan**

Kinerja keuangan pemerintah kota Kupang dikatakan baik dan mandiri apabila rasio pertumbuhan pendapatan keuangan daerah mencapai target diatas 50%. Semakin besar tingkat pertumbuhan pendapatan keuangan daerah maka semakin besar pula kemandirian pemerintah daerah terhadap dana eksternal.

Berdasarkan perhitungan laporan realisasi keuangan APBD diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kota Kupang dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami penurunan, dapat dilihat dari prosentase kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dengan rata-rata prosentase (11,53%) dengan kategori positif.

Sedangkan untuk pertumbuhan pendapatan diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kota Kupang dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami penurunan, dapat dilihat dari Prosentase Kenaikan Dan Penurunan Pertumbuhan Pendapatan yaitu sebesar (57,6%) dengan kategori positif.

#### **g. Rasio Pertumbuhan Belanja**

Berdasarkan perhitungan laporan realisasi belanja keuangan APBD diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kota Kupang dari tahun 2017 sampai tahun

2021 mengalami penurunan, dapat dilihat dari prosentase kenaikan dan penurunan belanja daerah dengan rata-rata prosentase (7,78%).

Sedangkan untuk pertumbuhan belanja diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kota Kupang dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan, dapat dilihat dari prosentase kenaikan dan penurunan pertumbuhan belanja dengan rata-rata prosentase (27,60%).

#### **Simpulan dan Implikasi Penelitian**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan kinerja keuangan pemerintah kota Kupang diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kota Kupang tahun 2017-2021 kurang baik, hal tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio keuangan daerahnya sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan pemerintah kota Kupang dari tahun 2017-2021 dilihat dari perhitungan rasio derajat desentralisasi dikategorikan kurang dengan rata-rata PAD nya sebesar Rp. 1.119.150.950.400 sedangkan rata-rata total pendapatannya sebesar Rp. 939.770.481.200.000. Hal ini dikarenakan PAD kota Kupang masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerahnya.
2. Kinerja keuangan daerah pemerintah kota Kupang dari tahun 2017-2021 dilihat dari perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dikategorikan sangat tinggi dengan rata-rata pendapatan transfernya sebesar Rp. 855.333.618.500 sedangkan rata-rata total pendapatannya sebesar Rp. 1.132.836.122.250. Hal ini dikarenakan dalam membiayai pelaksanaan dan pembangunan daerahnya pemerintah kota Kupang

masi bergantung pada bantuan pemerintah pusat, hal ini disebabkan oleh pengelolaan PAD masih belum maksimal.

3. Kinerja keuangan daerah pemerintah kota Kupang dari tahun 2017-2021 dilihat dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah di kategorikan rendah sekali (instruktif) dengan rata-rata PAD nya Rp. 1.119.150.950.400 sedangkan rata-rata pendapatan transfer pusat sebesar Rp. 850.214.900.000. Hal ini terjadi karena pemerintah kota Kupang belum mampu dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahannya.
4. Kinerja keuangan daerah pemerintah kota Kupang dari tahun 2017-2021 dilihat dari perhitungan rasio Efektivitas di kategorikan sangat efektif (sangat baik) dapat dilihat dari rata-rata realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 927.894.500.000 sedangkan rata-rata total realisasi penerimaan daerah sebesar Rp. 1.165.181.601.200. hal ini dikarenakan pemerintah kota Kupang dalam merealisasikan pendapatan daerahnya sudah sangat baik, dengan kata lain realisasi pendapatan daerah pemerintah kota kupang melebihi atau mendekati target anggaran yang telah direncanakan.
5. Kinerja keuangan daerah pemerintah kota Kupang dari tahun 2017-2021 dilihat dari perhitungan rasio efisiensi di kategorikan kurang efisien (kurang baik) dapat dilihat pada rata-rata realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.410.757.202.500 sedangkan rata-rata pada target penerimaan sebesar Rp. 1.132.836.122.250. hal ini dikarenakan kinerja pemerintah kota Kupang belum

mampu memaksimalkan PADnya, meskipun sudah mampu menekan belanja daerahnya dari yang telah dianggarkan sebelumnya.

6. Kinerja keuangan daerah pemerintah kota Kupang dari tahun 2017-2021 dilihat dari perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan di kategorikan positif dapat dilihat pada rata-rata realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 233.156.198.000 sedangkan rata-rata pada pertumbuhan pendapatan sebesar Rp. 51.592.012.251. Hal ini dikarenakan rata-rata rasio pertumbuhan pendapatannya sebesar -3 persen rendah sekali hal tersebut menggambarkan bahwa pemrintah kota Kupang belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun.

Sedangkan Kinerja keuangan daerah pemerintah kota Kupang dari tahun 2017-2021 dilihat dari perhitungan rasio pertumbuhan belanja di kategorikan negatif dapat dilihat dari rata-rata realisasi belanja daerah sebesar Rp. 1.357.846.655.250 sedangkan rata-rata pertumbuhan belanjanya sebesar Rp. 74.625.778.329. Hal ini dikarenakan rata-rata rasio pendapatan belanja pendapatannya sebesar -4 persen rendah, penurunan pertumbuhan belanja diakibatkan oleh menurunnya pendapatan daerahnya.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kinerja keuangan pemerintah kota Kupang tahun 2017-2021 adapun saran yang dapat di berikan sebagai berikut:

1. Untuk rasio derajat desentralisasi pemerintah daerah kota Kupang dari tahun 2017-2021, sebaiknya pemerintah kota Kupang harus lebih baik dalam memaksimalkan atau menggali potensi-potensi daerah guna meningkatkan PAD agar ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat maupun propinsi dapat diminimalisir dengan baik.
2. Untuk rasio ketergantungan keuangan daerah kota Kupang dari tahun 2017-2021, sebaiknya pemerintah kota Kupang harus lebih aktif dalam berkontribusi secara maksimal terhadap pelaksanaan pembangunannya agar tingkat ketergantungan keuangan daerah pada dana transfer pusat dapat diminimalisir dengan baik.
3. Untuk rasio kemandirian daerah kota Kupang dari tahun 2017-2021, sebaiknya pemerintah daerah kota Kupang harus lebih berinovasi dalam memperluas pendapatan daerah antara lain dengan memanfaatkan pariwisatanya untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya agar tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat maupun provinsi.
4. Untuk rasio efektifitas pemerintah daerah kota Kupang dari tahun 2017-2021, sebaiknya mampu mempertahankan upaya pemerintah kota Kupang dalam mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan daerahnya yang ada.
5. Untuk rasio efisiensi pemerintah daerah kota Kupang dari tahun 2017-2021, sebaiknya pemerintah kota Kupang harus lebih cermat dalam memperhitungkan biaya yang perlu dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan asli daerahnya.
6. Untuk rasio pertumbuhan pemerintah daerah kota Kupang dari tahun 2017-2021, sebaiknya pemerintah kota

Kupang lebih memperhatikan pertumbuhan pendapatan daerah yang bergerak secara negatif agar pemerintah kota Kupang lebih maksimal dalam mengelola potensi pendapatan daerahnya.

Sedangkan untuk rasio pertumbuhan belanja pemerintah kota Kupang dari tahun 2017-2021, sebaiknya pemerintah kota Kupang harus lebih memperhatikan peningkatan pendapatan daerah agar lebih meminimalisir penurunan pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun.

### Daftar Pustaka

- Athoillah, Anton. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV Pustaka Setia: Bandung.
- Caers Ralf, Cindy Du Bois, Marc Jegers, Sara De Gieter, Catherine Schepers, Roland Pepermans, 2006. "Principal-Agent Relationships on the Stewardship-agencyAxis". *Nonprofit Management and Leadership*. Vol. 17, No. 1.
- David M. Van Slyke. 2006. "Agents or Stewards: Using Theory To Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship". *Journal of Public Administration Research and Theory*, No. 17.
- Fahmi, 2014. *Manajemen teori*. ALFABETA: Bandung
- Fathah, Rigel Nurul. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*. Vol.8 No.1.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Empat. Salemba Empat: Jakarta.
- , *Akuntansi Sektor Publik*



- “*Akuntansi Keuangan Daerah*”. Edisi Revisi Salamba Empat, Jakarta. 2004.
- Hanafi, Mamduh M. 2016. *Analisis Laporan keuangan*. Yogyakarta : UUP STIM YKPN.
- Hery. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Jumingan. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lala Novikasari., Zukarnain zulkarnain. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Progres Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Universitas Banten Jaya*. Vol.3, No. 2.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Pustaka Baru Pres: Yogyakarta.
- Musthafa. 2017. *Manajemen Keuangan*. ANDI : Yogyakarta.
- Mutiha, Arthaingan H. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*. Vol.4 No.2.
- Nurhayati. 2015. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomis*. Vol.4 No.1.
- Petrie, Murray. 2002. *A Framework For Public Sector Performance Contracting*. *OECD Journal on Budgeting*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
- Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Setyaningrum, D. Dan Syafitri, F. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 9 (2): 154-170.
- Septiani, Tika. 2018. Analisis Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten Dan Kota Cirebon. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*. Vol. 3, No. 1. Di akses pukul 01. 27 tahun 2018.
- Sujarweni. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sunyoto. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Sugiyono, Arief. 2009. *Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan*. PT Grasindo, anggota Ikapi: Jakarta.
- . 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta, cv: Bandung.
- Sudirman Pauwah., I. Saerang., S. Mandey. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. *Jurnal EMBA*. Vol. 2, No. 3.
- S. Suranta Bandi., H. Dedy Perdana., M. Syafiqurrahman. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Provinsi Jawa Tengah Dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5, No. 2.
- Tharnton D. Deborah. 2009, “*Stewardship in Government Spending: Accountability Transparency, Earmarks, and Competition*”. No.09-1. *Public Interest Institute*.

- Undang-undang No.23 Tahun 2014 Pasal 175 Tentang Sumber Pendapatan Maupun Penerimaan Daerah.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan juga Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tantang Otonomi Daerah.
- Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Pasal 1 Angka 5 Tentang Otonomi adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah.
- Undang-undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pusat.
- Vargas Sanchez Alfonso. 2004 “Development of Corporate Governance Systems: Agency Theory Versus Stewardship Theory in Welsh Agrarian Cooperative Societies”. U: 4th Annual Conference of EURAM (European Academy of Management).
- Wonda, Welio. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Jurnal EMBA*. Vol.4 No.3.
- Wilson, R, Kent. 2010. “Steward Leadship: Characteristics of The Steward Leader in Cristian Nonprofit Organizatioans”. *A Dissertation Presented for the Degree of PhD at The University of Amberdeen*.
- Y. Fajriansyah., I. Elim., S. K. Walandouw. 2019. Analisa Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol. 7, No. 3.